

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Politik dengan agama sejatinya merupakan 2 entitas yang saling membutuhkan. Sejatinya unsur politik juga tidak dapat dipisahkan oleh berbagai kegiatan sosial masyarakat. Walaupun pernyataan tersebut tidak menunjukkan secara terbuka atas sikap politis. Namun, seorang kyai pastinya akan terlibat dalam dunia politik yang nantinya sebagai rujukan para murid atau santri dalam menunjukkan sikap politiknya di masyarakat. Pondok Pesantren memiliki kewajiban untuk membimbing para santri untuk bersikap demokratis. Melalui pengarahan dan pengetahuan tentang cara bersikap politik yang baik maka akan melatih santri untuk berpikir secara rasional.

Bentuk relasi di bidang ekonomi sendiri kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan *life skill* kepada santri. Memberikan materi *life skill* bertani pada santri bertujuan para santri ketika telah menyelesaikan pendidikan di Ponpes Segoro Agung tidak hanya mendapatkan ilmu agama melainkan pengembangan ekonomi pesantren. Pada bidang sosial dan agama Pondok Pesantren Segoro Agung yang bekerjasama dengan pemerintah telah memberikan dampak positif ke masyarakat. Melalui bantuan sosial masa pandemi, santunan yatim piatu, dan penyuluhan terkait membentuk keluarga yang berkualitas selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat membentuk pola pikir masyarakat bahwa edukasi pernikahan khususnya bagi seseorang yang ingin menikah itu sangatlah penting. Kemudian pada bidang pendidikan yang merupakan faktor terpenting dari suksesnya sebuah lembaga pendidikan. Adanya pengadaan fasilitas berupa lapangan dan gedung tahfidz menciptakan lingkungan belajar yang nyaman serta menjadikan pesantren sebagai lembaga yang mempunyai sifat kepemimpinan instruksional yang kuat.

Relasi tokoh politik dan Pondok Pesantren Segoro Agung dipengaruhi oleh 3 motif diantaranya motif teologis yang menunjukkan bahwa politik dalam agama islam itu fitrah yang harus dilaksanakan oleh umat islam. Kemudian, motif perubahan orientasi struktural dan kontekstualisasi pesantren dimana politik digunakan sebagai alat untuk mencapai kesepakatan dua pihak. Hal tersebut ditunjukkan oleh kerjasama pesantren dengan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, motif ekonomi pragmatis yang menganggap bahwa politik juga berkaitan untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Hal ini ditunjukkan melalui kerjasama pesantren dengan pemerintahan dibidang pendidikan terkait penyediaan sarana prasarana pendidikan.

Penelitian ini telah mengimplikasikan bahwa relasi politik yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Segoro Agung dengan tokoh politik menunjukkan citra yang baik. Sikap netral yang telah ditunjukkan tidak menjadikan sebuah pondok pesantren akan mendapatkan pengecualian dari tokoh politik dan pemerintah. Justru banyaknya tokoh politik yang datang akan semakin mendatangkan banyak manfaat baik secara politik dan agama. Sebagai tokoh politik tentunya mendapatkan kemudahan karena pondok pesantren telah menyediakan sarana atau wadah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Terlepas dari niat baik atau buruknya seseorang dengan catatan tidak merugikan masyarakat tentu saja hal ini diperbolehkan. Harapannya hasil yang telah ditunjukkan pada penelitian ini dapat memecah stigma masyarakat bahwa percaturan politik dan agama itu hal yang tidak diperbolehkan. Melalui relasi tersebut Pondok Pesantren Segoro Agung telah memberikan gambaran bahwa seluruh komponen kehidupan akan selalu bersinggungan dengan politik. Baik secara ekonomi, sosial, maupun pendidikan merupakan satu kesatuan yang harus dijaga keseimbangannya. Komponen tersebut harus saling bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Saran

Relasi agama dan politik pada dasarnya memiliki kekuatan positif dan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut akan menjadi kombinasi yang baik dengan catatan selalu mendahulukan kepentingan bersama. Manfaat yang dirasakan dari relasi politik sangat beragam dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terjaminnya sistem pendidikan pesantren, serta meningkatkan kualitas SDM dari hasil pelatihan yang bekerja sama dengan pemerintah. Relasi ini tentunya tidak akan terwujud jika santri dan masyarakat tidak aktif berpartisipasi dalam upaya yang telah dibentuk oleh pesantren dan pemerintah.

Sebagai toko politik yang sering mendatangi lembaga pendidikan khususnya pesantren, kondisi ini sangat diperbolehkan jika masih dalam batas wajar. Dalam artian seorang politisi benar-benar mendahulukan kepentingan bersama. Walaupun pada realitas yang sudah terjadi pada kasus politik praktis seringkali pihak pesantren atau masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini memiliki harapan bagi seluruh politisi di Indonesia supaya lebih memperhatikan kepentingan rakyat. Selain itu, upaya meminimalisir stigma masyarakat sudah seharusnya bagi para politisi untuk bersaing secara kompetitif dan mengatasmakan rakyat sebagai “tuan” setiap menjalankan aktivitas politik. Bagi pesantren juga perlu selektif terhadap seluruh tawaran politisi sebagai bentuk preventif untuk mencegah hal akan merugikan pesantren. Sedangkan bagi kyai sebagai pemimpin sudah seharusnya menempatkan posisinya pada seluruh golongan karena selain sebagai pemimpin para kyai sebagai lambang moralitas dan akhlak mulia yang kini semakin pudar keberadaannya.